

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan, termasuk dalam masalah dasar yang menjadi fokus utama pemerintahan negara. Terdapat beragam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menekan tingkat kemiskinan masyarakat. Upaya pengentasan kemiskinan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada kenyataannya, permasalahan mengenai kemiskinan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang mempunyai keterkaitan, seperti pendidikan yang terlalu rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, serta beban keluarga.² Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni atau menguasai keterampilan tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai mata pencahariannya. Searah dengan adanya sikap malas bekerja yang membuat seseorang acuh dengan keadaan ekonominya dan lebih memilih untuk menganggur. Di sisi lain, terdapat golongan orang yang mempunyai semangat bekerja keras namun belum atau tidak dapat tercapai karena kendala seperti keterbatasan lapangan kerja, keterbatasan modal serta keterbatasan sumber daya. Di samping itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dapat berisiko menambah beban dalam keluarga sehingga tuntutan hidup yang

² Reza Attabirrobby Annur, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013", dalam *Economics Development Analysis Journal* Vol. 2, No. 4, 2013, hal. 415, <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.3209>

harus mereka penuh semakin tinggi pula. Dalam hal ini, diambil dua hal yang menjadi sorotan utama saat ini, yakni yakni jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk usia produktif, yang memiliki kaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Saat ini dunia secara keseluruhan tengah menghadapi permasalahan besar, yakni pandemi *covid-19* yang menyebabkan banyak dampak buruk, salah satunya ialah kerugian pada perekonomian global. Pada awalnya, sebelum menjadi pandemi yang merugikan dan berdampak secara luas, penyakit *covid-19* ini muncul pertama kali di negara China tepatnya di kota Wuhan pada akhir tahun 2019. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 200 negara yang terjangkit oleh *Coronavirus Disease* ini. Oleh sebab itu pada 11 Maret 2020 WHO selaku organisasi kesehatan dunia, mengumumkan secara resmi bahwa wabah ini merupakan pandemi global. Wabah *covid-19* ini berasal dari hewan liar yang terinfeksi virus corona. Banyak sekali teori konspirasi yang berkaitan dengan latar belakang merebaknya virus corona ini. Namun, terlepas dari itu semua, secara pasti pandemi ini membawa banyak sekali dampak negatif bagi berbagai bidang, terlebih pada bidang kesehatan dan perekonomian. Di luar bidang kesehatan, dampak yang timbul akibat pandemi ini adalah kemerosotan perekonomian negara.³

Untuk itu dalam rangka mengantisipasi segala permasalahan yang muncul pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan wajib *social*

³ Siti Indayani dan Budi Hartono, “Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, Vol. 18, No.2, 2020, hal. 202, <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>

distancing. Semua hal yang biasa dilakukan secara langsung, kini diubah melalui sistem *online*, termasuk bekerja, sekolah dan ibadah. *Social distancing* dilakukan dengan tujuan menjaga jarak antar personal yang diharapkan dapat menekan angka pertambahan kasus infeksi virus corona ini. Namun pada penerapannya, penambahan kasus harian tetap belum berkurang dengan maksimal sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan baru yang disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan diterapkannya kebijakan baru mengenai PSBB yang diputuskan oleh pemerintah dengan tujuan mengendalikan kenaikan angka *covid-19* di masyarakat, maka terdapat sisi lain yang harus dipahami bahwa produktivitas masyarakat sedikit banyak akan terpengaruh, sebab terdapat sejumlah kegiatan perekonomian yang tidak dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Berbagai jenis program pemulihan dalam dunia usaha tentu terus menerus digiatkan pemerintah dengan tujuan agar mereka tetap dapat bertahan. Pemerintah mempersiapkan dukungan untuk dunia usaha melalui koordinasi dengan BI dan OJK serta perbankan nasional agar sektor bisnis, sektor usaha, dan sektor riil setidaknya tetap dapat bertahan meskipun aktivitas ekonominya berhenti. Program ini memiliki tujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha mereka selama masa pandemi *covid-19*. Namun, pada kenyataannya sebagian besar perusahaan dengan terpaksa harus tetap mengambil upaya agar dapat bertahan di tengah situasi

pasar yang sedang krisis. Upaya yang dipilih oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi tersebut kebanyakan adalah dengan cara pemutusan hubungan kerja secara massal. Langkah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi variabel produksi pada internal perusahaan sehingga beban perusahaan dapat berkurang. Hal ini tentu semakin menambah rentetan panjang jumlah pengangguran secara keseluruhan.⁴

Tinggi rendahnya pengangguran adalah hal yang krusial untuk pengukuran berhasil tidaknya pembangunan pada perekonomian. Sebab pengangguran mengindikasikan kesejahteraan masyarakat hasil pembangunan pada perekonomian. Dengan meningkatnya jumlah angka pengangguran masyarakat Indonesia akibat *covid-19* maka akan membawa dampak besar bagi banyak hal yang berkaitan. Dampak pengangguran terhadap perekonomian antara lain, mengurangi *output* negara, menurunkan taraf hidup per kapita, melambatkan proses pembangunan, dan mendongkrak angka kemiskinan. Sedangkan dampak sosial dari pengangguran yaitu menurunnya kemakmuran keluarga akibat tidak adanya penghasilan serta tingginya tindakan kriminal pada masyarakat.⁵

Pengangguran merupakan masalah berat yang membawa pengaruh langsung terhadap perekonomian secara makro. Bagi kebanyakan orang, menganggur dapat menyebabkan turunnya standar kehidupan bahkan timbulnya tekanan psikologis, sebab ketika mereka kehilangan pekerjaan

⁴ Dewi Wuryandani, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya”, dalam *Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* Vol. XII, No. 15, 2020, hal. 21, <https://berkas.dpr.go.id>

⁵ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 9

maka penghasilan akan terhambat. Pada kenyataannya, tingkat pengangguran pada suatu negara tidak akan pernah menyentuh angka nol. Hal tersebut dikarenakan pasti ada beberapa persen dari jumlah keseluruhan angkatan kerja yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Serta di setiap perekonomian pasar bebas tentu seluruhnya menghadapi masalah pengangguran dan berupaya mencapai keadaan *full employment*.⁶

Selain itu, jumlah penduduk merupakan salah satu indikator utama pada sebuah negara. Para ahli ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk adalah input potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi pada suatu perusahaan. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan. Di sisi lain, ahli ekonomi seperti Robert Malthus menganggap bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada suatu keadaan optimum penambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dan malah akan dapat menurunkannya. Menurut teori Harrod-Domar, modal insani atau manusia merupakan faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi dari dalam dan bersifat endogen. Hubungan teori Harrod-Domar dengan kemiskinan memaparkan bahwa penambahan modal dan tenaga kerja secara bersama-sama akan menghasilkan produksi dan pendapatan nasional. Peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan nasional ditentukan oleh peningkatan pengeluaran

⁶ N Gregory Mankiw, *Makroekonomi Edisi Keenam*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 154

masyarakat. Pada tahapan selanjutnya apabila distribusi pendapatannya baik maka pendapatan per kapita masyarakat meningkat sehingga kemiskinan dapat berkurang.⁷

Selanjutnya mengenai pertumbuhan pada penduduk didefinisikan sebagai runtutan keseimbangan pada unsur kependudukan yang terus menerus berkembang sehingga menyebabkan perubahan yang dinamis pada jumlah penduduk. Permasalahannya perkembangan pada pertumbuhan penduduk yang terus menerus terjadi tersebut apabila sudah terlampaui tinggi, dikhawatirkan akan dapat menyebabkan banyak macam masalah dan dapat menghambat pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk yang melampaui batas memiliki kemungkinan besar untuk menjadi suatu penghambat dalam proses pertumbuhan perekonomian apabila tidak ditangani dengan sebaik mungkin.⁸

Mudrajad Kuncoro juga memaparkan pendapat yang serupa dengan pernyataan tersebut, menurutnya jumlah penduduk dalam hal pembangunan ekonomi suatu daerah termasuk ke dalam permasalahan yang mendasar. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan rakyat serta upaya pengurangan angka kemiskinan. Penduduk yang berkembang terlalu pesat diyakini dapat mengakibatkan pengikisan sumber daya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologi, yang kemudian dapat

⁷ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010), hal. 292

⁸ Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal.20

memunculkan permasalahan sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan. Penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar atau *basic needs approach*. Dengan pendekatan ini, penduduk miskin dimaknai sebagai penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri dalam memperoleh kehidupan yang layak, baik kebutuhan dasar berupa makanan maupun kebutuhan dasar non makanan.

Tabel 1.1
Kemiskinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Keseluruhan	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2016	1.026.100 jiwa	Rp304.518	84.350 jiwa	8.23%
2017	1.030.790 jiwa	Rp314.532	82.800 jiwa	8.04%
2018	1.110.921 jiwa	Rp328.640	75.230 jiwa	7.27%
2019	1.118.814 jiwa	Rp341.651	70.010 jiwa	6.74%
2020	1.089.780 jiwa	Rp362.213	76.400 jiwa	7.33%

Sumber: KTDA 2017-2021 (BPS Kabupaten Tulungagung)

Berikut pada tabel 1.1 menunjukkan seberapa banyak pertambahan jumlah penduduk setiap tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.⁹ Jumlah penduduk secara keseluruhan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun, dalam hal ini jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian adalah penduduk usia produktif bukan secara total keseluruhan.

⁹ Badan Pusat Statistik, “Kemiskinan dan Ketimpangan” dalam www.bps.go.id, diakses pada 24 Januari 2021

Sebagai pembeda antara penduduk miskin dan bukan penduduk miskin diperlukan suatu batasan yang diterapkan sebagai patokan. Batas tersebut biasa disebut dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan dinyatakan dalam nilai rupiah dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Dapat diamati dari tabel bahwa garis kemiskinan masyarakat di Kabupaten Tulungagung tiap tahunnya terus menerus mengalami kenaikan.

Di sisi lain, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin mengalami perubahan yang searah. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung terus menerus menurun, seiring dengan terus menurunnya persentase penduduk miskin pada masyarakatnya, terkecuali pada tahun 2019 yang justru menunjukkan peningkatan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 sebanyak 84.350 jiwa kemudian turun secara signifikan menjadi sebanyak 70.010 jiwa pada tahun 2019, lalu kembali naik hingga 76.400 jiwa pada tahun 2020. Dengan persentase penduduk miskinnya yang dimulai pada angka 8.23% pada tahun 2016 dan menurun hingga angka 6.74 pada tahun 2019 dan naik menjadi 7.33% pada tahun 2020.

Pada perbandingan jumlah penduduk miskin antar kabupaten tahun 2020, Kabupaten Tulungagung menduduki posisi pertama dengan nilai sebesar 70.01, yang artinya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung merupakan yang terendah dibanding dengan kabupaten lain

yang lokasinya berdekatan, yakni Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Malang.¹⁰

Dalam hal ini, data yang digunakan pada penelitian adalah jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Tulungagung yang dipublikasikan pada website resmi BPS pada tahun 1991-2020. Pengangguran terbuka, merupakan pengangguran yang secara nyata dan sepenuh waktu tidak bekerja. Berikut data perkembangan pengangguran terbuka dan jumlah penduduk yang berada pada usia produktif yakni yang termasuk pada angkatan kerja di Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Keseluruhan	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Pengangguran Terbuka	TPT
2016	1.026.100 jiwa	547.466 jiwa	21.599 jiwa	3.95%
2017	1.030.790 jiwa	537.081 jiwa	12.197 jiwa	2.27%
2018	1.110.921 jiwa	569.310 jiwa	14.835 jiwa	2.61%
2019	1.118.814 jiwa	571.811 jiwa	19.201 jiwa	3.36%
2020	1.089.780 jiwa	606.711 jiwa	27.951 jiwa	4.61%

Sumber: KTDA 2017-2021 (BPS Kabupaten Tulungagung)

Menurut badan pusat statistik, penduduk yang termasuk dalam hitungan angkatan kerja adalah mereka yang tengah berada dalam usia kerja (produktif) yakni >15 tahun yang bekerja, atau punya pekerjaan namun

¹⁰ BPS Kabupaten Tulungagung, *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2020/Tulungagung Regency in figures 2020*, (Tulungagung: CV Azka Putra Pratama, 2020), hal. 595

sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tulungagung terlampir pada tabel 1.2. Diketahui bahwa tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2017 yang mengalami penurunan sebesar 10.385 jiwa dari tahun sebelumnya.¹¹

Diketahui dari data pada website resmi BPS bahwa tingkat pengangguran terbuka masyarakat Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan pada tahun 2017, kemudian tahun-tahun selanjutnya cenderung persisten naik. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka masyarakat di Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 2.27% yang artinya menurun sebanyak 1.68% dari tahun 2016, kemudian perlahan naik secara signifikan hingga pada tahun 2020 mencapai angka 4.61%. Oleh karena hal itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya pengaruh jumlah pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk usia produktif, serta jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung ini.

Pada beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, hasil yang diperoleh relatif beragam. Dalam penelitian yang berjudul “Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan” oleh Ratih Probosiwi yang dilakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 lalu, membuktikan bahwa ternyata tidak ada kaitan langsung antara pengangguran dan kemiskinan. Sebab hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ternyata pengangguran dan kemiskinan berpengaruh secara tidak signifikan. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada

¹¹ *Ibid.*, hal. 595

kaitan langsung antara pengangguran dan kemiskinan di Kota Yogyakarta yang menurutnya disebabkan karena penganggur adalah kelompok terdidik yang sedang mencari pekerjaan dan tidak termasuk pada kelompok masyarakat miskin.¹²

Serupa dengan penelitian berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi” oleh Novri Silastri (2017) yang menggunakan metode time series menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi, artinya dengan bertambah jumlah penduduk sebagai pemicu berbagai pembangunan sehingga akan menggerakkan bermacam kegiatan ekonomi dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan akan turun. Pendapatan Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.¹³

Meski pun tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada suatu daerah, namun pola hubungan di antara kedua variabel tersebut tidaklah selalu searah. Hal tersebut dibuktikan

¹² Ratih Probosiwi, “Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan”, dalam *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 15, No. 2, 2016, hal. 89, <https://ejournal.kemsos.go.id>

¹³ Novri Silastri, “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi”, dalam *JOM Fekon*, Vol. 4, No. 1, 2017), hal. 105-106, <https://jom.unri.ac.id>

pada penelitian yang dilakukan oleh Yarlina Yacoub pada tahun 2012 lalu yang diberi judul “Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. Pada penelitian yang menggunakan metode data panel tersebut diperoleh hasil bahwa penganggur yang ada di rumah tangga tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan hidup keluarga mereka agar tetap berada di atas garis kemiskinan. Ini terutama terjadi pada pengangguran terdidik. Di sisi lain, kenyataan besarnya tingkat pengangguran tersembunyi (bekerja dengan jam kerja yang rendah atau dengan pendidikan yang rendah), justru yang dikhawatirkan menjadi kendala, sebab walau pun mereka bekerja (tidak menganggur), namun pendapatan yang diterima relatif rendah dan di bawah garis kemiskinan.¹⁴

Dapat diketahui juga dari data pada penelitian tersebut bahwa pada kelompok keluarga yang sangat miskin, justru tingkat pengangguran rendah karena sebagian besar anggota keluarga bekerja untuk bisa bertahan hidup, terkadang anak-anak juga dilibatkan dalam pekerjaan dengan alasan penghasilan kepala keluarga atau orang tua tidak mencukupi kebutuhan keluarga, terutama pada keluarga petani dengan pendidikan yang rendah. Dengan produktivitas yang sangat rendah, petani di Kalimantan Barat secara rata-rata miskin, walaupun dalam kategori tidak menganggur.¹⁵

¹⁴ Yarlina Yacoub, “Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”, dalam *Jurnal Eksos*, Vol. 8, No. 3, 2012, hal.176, ISSN 1693 – 9093 <https://jurnal.untan.ac.id>

¹⁵ *Ibid.*, hal. 177

Pada kenyataannya terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tingkat pengangguran agar tidak mengganggu keberlangsungan pembangunan ekonomi. Namun pada prosesnya, masing-masing individu dalam masyarakat lah yang menjadi penentu bagi keberhasilan upaya yang dilakukan. Dalam Islam terdapat penjelasan tentang proses pencarian rezeki, yang menunjukkan bahwa Allah SWT telah menyediakan rezeki untuk masing-masing umatNya yang senantiasa berusaha dan tidak malas sebagaimana dijelaskan di kitab Al Quran surah At-Taubah [9] : 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسُوْرُوْا اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۹

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut serta menganalisis apakah variabel jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk usia produktif berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk usia produktif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Dalam hal ini

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2013), hal. 203

adalah jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung. Untuk itu pembahasan lebih lanjut akan dimuat dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Jumlah Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh jumlah pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung, meliputi :

1. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal saat pandemi sehingga terjadi peningkatan pada jumlah pengangguran secara keseluruhan.
2. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk tiap tahun yang terjadi relatif konstan akan menyebabkan penurunan produktivitas jika tidak diiringi dengan perluasan kesempatan kerja yang memadai.
3. Angka jumlah penduduk miskin meningkat akibat pengaruh pandemi.
4. Di sisi lain tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Tulungagung tiap tahunnya selalu menunjukkan penurunan terkecuali pada tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui mengenai latar belakang permasalahan, untuk itu dapat ditentukan rumusan masalah yakni :

1. Apakah jumlah pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah jumlah penduduk usia produktif berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk usia produktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya berikut :

1. Menganalisis pengaruh jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung.
3. Menganalisis pengaruh jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk usia produktif secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian mampu membawa manfaat bagi seluruh pembaca, baik secara teori maupun praktek:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian mampu menjadi sarana pengembangan ilmu utamanya bagi semua pihak yang ingin mengetahui ilmu ekonomi mengenai jumlah pengangguran terbuka, jumlah penduduk usia produktif serta jumlah penduduk miskin.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini mampu menjadi sarana dalam menuangkan ilmu yang didapat oleh penulis pada pembelajaran kuliah mengenai ekonomi makro khususnya mengenai pengangguran, kependudukan dan kemiskinan, serta memberikan pengetahuan baru yang belum pernah dipelajari penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

b. Bagi akademisi

Penelitian diharapkan mampu memberi informasi dan kerangka agar lebih paham teori-teori berkaitan dengan ilmu ekonomi mengenai jumlah pengangguran terbuka, jumlah penduduk usia produktif serta jumlah penduduk miskin.

c. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran untuk memperbaiki perekonomian khususnya pada jumlah pengangguran terbuka, jumlah penduduk usia produktif serta jumlah penduduk miskin.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup diartikan sebagai batas-batas yang ditentukan peneliti agar dalam pelaksanaan penelitiannya akan terstruktur dan lebih efisien. Tujuan dari penentuan ruang lingkup penelitian yang dilakukan ialah untuk mengelompokkan faktor-faktor apa yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pada penelitian kali ini digunakan untuk mengukur besar tidaknya pengaruh jumlah pengangguran terbuka, jumlah penduduk usia produktif serta jumlah penduduk miskin Kabupaten Tulungagung.

Ruang lingkup penelitian ini, yaitu keterkaitan antara variabel X terhadap variabel Y, dimana terdiri dari dua variabel bebas (independen) jumlah pengangguran terbuka (X1) dan jumlah penduduk usia produktif (X2), serta variabel terikat (dependen) jumlah penduduk miskin Kabupaten Tulungagung (Y). Untuk keterbatasan penelitian yaitu hanya meneliti pada perkembangan jumlah pengangguran terbuka, jumlah penduduk usia produktif serta jumlah penduduk miskin Kabupaten Tulungagung tahun 1991-2020.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Jumlah Pengangguran Terbuka

Jumlah pengangguran terbuka adalah besaran yang menunjukkan penduduk yang termasuk pada golongan angkatan kerja dan memang tengah berusaha mencari kerja dengan upah tertentu namun belum memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

b. Jumlah Penduduk Usia Produktif

Jumlah penduduk usia produktif dalam hal ini adalah kuantitas penduduk yang terus bertambah atau berkurang secara dinamis dalam proses keseimbangan komponen kependudukan pada pertumbuhan penduduk yang berusia 15-64 tahun.¹⁷

c. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin ialah nilai secara keseluruhan ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi patokan atau standar rata-rata kehidupan yang layak pada masyarakat di suatu wilayah.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dipahami sebagai penjelasan mengenai suatu variabel yang menyajikan arti dan digunakan sebagai pedoman pada pengukuran variabel itu sendiri. Pada penelitian kali ini, variabel bebas (independen) ialah jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Tulungagung, sedangkan variabel terikat (dependen) mencakup jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung. Berikut dengan penjelasan variabel yang terdapat dalam penelitian¹⁸ :

a. Jumlah pengangguran terbuka yang digunakan dalam indikator penelitian ini dapat mempengaruhi jumlah

¹⁷ Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), hal. 99

¹⁸ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 97-109

penduduk miskin yaitu dengan mengurangi penghasilan sehingga dapat menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat.

- b. Jumlah penduduk usia produktif pada indikator penelitian ini dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yaitu apakah dengan semakin pesatnya perkembangan jumlah manusia akan dapat menyebabkan kebutuhan semakin sulit untuk dicukupi sehingga meningkatkan tingkat kemiskinan atau justru semakin banyak tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang dapat mengikis tingkat kemiskinan.
- c. Jumlah penduduk miskin dalam indikator penelitian ini dapat dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang terjadi akibat meningkatnya jumlah pengangguran dan fluktuasi pada jumlah penduduk.